

LAMPIRAN :

TINDAK LANJUT HASIL DESK EVALUATION CALON SATUAN KERJA WBK/WBBM TAHUN 2020

SATKER : BPS KABUPATEN MAJENE

 PENILAI : 1. SULISTIYOWATI (DALNIS)
 2. ANA WIDIASTUTI (KETUA TIM)
 3. ARIF SANTOSO (ANGGOTA TIM)

KRITERIA PENILAIAN				DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
A.	PROSES (60)				
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)				
	1	Tim Kerja (1)			
		a.	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	SK Tim telah dibentuk per tanggal 1 September 2019, jika SK tersebut merupakan SK Perubahan agar melampirkan SK Pembentukan pada awal tahun 2019. Karena dari dokumen dukung lain pembangunan ZI di BPS Kab Majene telah dilakukan sejak awal tahun 2019.	BPS Kab Majene telah melengkapi SK Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
		b.	Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas	1. Belum terdapat notulen rapat pembentukan tim kerja yang menerangkan alasan penentuan orang-orang yang dipilih sebagai Ketua, Koordinator, Sekretaris, dan Anggota, serta belum mempertimbangkan kewenangan, tupoksi, dan kompetensi anggota tim. 2. Belum terdapat SOP/mechanisme yang menjelaskan tata cara pemilihan anggota Tim	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene: (i) mekanisme yang menjelaskan tata cara pemilihan anggota Tim (ii) Kertas kerja penentuan anggota Tim Kerja
	2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)			
		a.	Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah ada, namun perlu perbaikan karena belum mencerminkan rencana pembangunan ZI di BPS Kabupaten Majene. Masih terdapat di beberapa bagian yang menyebutkan ZI di "BPS Provinsi Sulbar".	BPS Kabupaten Majene telah memperbaiki dokumen rencana kerja pembangunan ZI. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene: (i) Undangan, daftar hadir, dan dokumentasi rapat penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI; (ii) Notulen pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan ZI;
		b.	Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Menambahkan target-target prioritas dalam dokumen pembangunan ZI yang akan dilakukan dan sesuai dengan BPS Kabupaten Majene.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene berupa laporan pelaksanaan penyusunan target prioritas ZI.
		c.	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	-	-
	3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)			
		a.	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	1. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas BPS Kab Majene hanya dibuat untuk bulan Januari-April 2019, agar membuat laporan pelaksanaan tahun 2019. 2. Bukti-bukti belum dilampirkan dalam Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. 3. Masih terdapat bagian yang menyebutkan "BPS Sulbar"	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas BPS Kab Majene telah diperbaiki. Untuk perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene agar seluruh kegiatan rencana kerja tiap bulan dimasukkan dalam laporan pelaksanaan. Masih terdapat beberapa kegiatan dalam rencana kerja tidak dimasukkan dalam laporan pelaksanaan.
		b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	1. Belum terdapat laporan monitoring dan evaluasi untuk bulan mei-desember 2019 2. Belum terdapat bukti rapat dilakukannya monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas 3. Masih terdapat bagian yang menyebutkan "BPS Sulbar"	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi bukti laporan monitoring dan evaluasi.
		c.	Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	1. Tindak lanjut tidak sesuai dengan monitoring dan evaluasi tim internal BPS Kabupaten Majene. 2. Laporan masih menggambarkan "BPS Provinsi Sulawesi Barat", seperti dalam kata pengantar menyebutkan telah memperoleh WBK. Agar memperbaiki laporan sesuai dengan keadaan real di BPS Kabupaten Majene.	Agar laporan tindak lanjut dibuat secara bulanan, karena laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim internal secara bulanan.
	4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)			
		a.	Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	-	-
		b.	Sudah ditetapkan agen perubahan	SK belum disahkan oleh Kepala Satker serta belum memuat uraian Tugas dan Fungsi agen perubahan	SK telah ditanda tangani kepala satker, serta terdapat uraian tugas dan fungsi. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene berupa undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat pembentukan agen perubahan.
		c.	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	-	-

KRITERIA PENILAIAN				DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
			d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Agar menambahkan notulen, daftar hadir dan dokumentasi rapat pembangunan zona integritas yang menunjukkan bahwa usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene berupa dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai.
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)					
		1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)		
			a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	1. SOP untuk Subbag Tata Usaha, Seksi Sosial dan Seksi Produksi belum disahkan oleh Kepala Unit Kerja 2. SOP belum menggambarkan inovasi yang selaras dengan peta proses bisnis	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene berupa SOP Inovasi unit kerja.
			b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	1. Belum terlihat inovasi pada SOP yang diterapkan. 2. Pada bukti yang dikumpulkan belum terdapat pengesahan/paraf penilai.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene : (i) Memorandum pelaksanaan tugas sesuai SOP pada tiap penugasan (ii) Laporan kegiatan-kegiatan dicantumkan bahwa pelaksanaan sesuai SOP (iii) Bukti rapat evaluasi suatu kegiatan sekaligus membahas penerapan SOP-nya (disebut dalam notulen) (iv) Bukti dukung yang disebutkan dalam SOP terkait
			c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	SOP telah dievaluasi (File "Evaluasi SOP 7601"), telah terdapat potensi permasalahan dan langkah penyelesaian, namun SOP yang ada potensi permasalahan belum terdapat perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene: (i) Bukti pelaksanaan rapat evaluasi atas SOP, misalnya undangan, daftar hadir, notulen (ii) Dokumen SOP awal dan SOP perbaikan
		2	E-Office (2)		
			a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	-	-
			b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	-	-
			c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	-	-
			d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan tiap bulan, namun untuk "BPS Kabupaten Majene Link" belum terdapat monitoring dan evaluasinya.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene: (i) Bukti pelaksanaan rapat evaluasi penggunaan TI, misalnya undangan, daftar hadir, notulen; (ii) Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi rapat tersebut, misal capture progres perbaikan TI.
		3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5)		
			a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	KIP belum disahkan oleh Koordinator Tim Penataan Tata Laksana Pembangunan Zona Integritas BPS Kabupaten Majene.	Dokumen tindak lanjut KIP (keterbukaan informasi publik) sudah diterapkan telah sesuai.
			b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi belum disahkan oleh Koordinator Tim Penataan Tata Laksana Pembangunan Zona Integritas BPS Kabupaten Majene.	Dokumen tindak lanjut KIP (keterbukaan informasi publik) sudah dimonitoring dan dievaluasi telah sesuai.
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)					
		1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)		
			a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Belum melampirkan analisis beban kerja di BPS Kabupaten Majene sesuai dengan Perka No 267 tahun 2019.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi analisis beban kerja.
			b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Terdapat perbedaan antara jumlah kebutuhan ideal pegawai lima tahun ke depan di BPS Kabupaten Majene sebanyak 31 pegawai lebih sedikit dibandingkan dengan Perka tahun 267 tahun 2019 sebanyak 36 pegawai.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene untuk pelaksanaan rencana kebutuhan pegawai (upaya rotasi, upaya pengajuan pegawai baru): (i) Bukti rotasi pegawai, dapat berupa SK. (ii) Bukti usulan pengajuan pegawai baru.
			c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	-	-
		2	Pola Mutasi Internal (2)		
			a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	-	-
			b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	-	-
			c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Belum terdapat monitoring dan evaluasi untuk pegawai yang di mutasi 5 orang KSK dan 1 orang staf subbag tata usaha.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan mutasi.

KRITERIA PENILAIAN				DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
		3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)		
			a. Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi	Belum terdapat bukti dukung dilakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi dokumen <i>Training Need Analysis</i> .
			b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Belum terdapat bukti dukung rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene berupa dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai yang berbasis pada hasil pengelolaan kinerja pegawai. SKP menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kompetensi pegawai.
			c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Belum terdapat bukti dukung kesenjangan pegawai dengan standar kompetensi.	BPS Kabupaten Majene agar berupaya memperkecil kesenjangan kompetensi sampai dibawah 25%.
			d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	-	-
			e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)	Dokumen yang dilampirkan hanya laporan sosialisasi SP2020 dan notulen rapat evaluasi, belum terdapat upaya pengembangan kompetensi lainnya.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi dokumen upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai.
			f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Bukti yang dilampirkan berupa notulen rapat evaluasi tidak relevan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene: (i) Laporan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai (dievaluasi juga peningkatan kinerjanya); (ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi.
		4	Penetapan kinerja individu (4)		
			a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Agar menambahkan bukti dukung berupa SKP yang terkait dengan kinerja organisasi dan indikator kinerja	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi IKI untuk semua pegawai.
			b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	Ukuran kinerja yang ada hanya untuk kepala unit kerja dan kepala seksi/kepala sub bagian. Belum terdapat	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi ukuran kinerja individu.
			c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	-	-
			d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	-	-
		5.	Pengaturan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)		
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Belum terdapat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
		6.	Sistem Informasi Kepegawaian (1)		
			a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	-	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Majene: (i) Jadwal pemutakhiran data informasi kepegawaian (ii) Laporan pemutakhiran data informasi kepegawaian (bulanan) melalui aplikasi SIMPEG
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)					
		1	Keterlibatan pimpinan (5)		
			a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	-	-
			b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	-	-
			c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	-	-
		2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)		
			a. Dokumen perencanaan sudah ada	-	-
			b. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	-	-
			c. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	Belum terdapat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	BPS Kabupaten Majene IKU yang disampaikan telah sesuai dengan Perka No 2 Tahun 2017
			d. Indikator kinerja telah SMART	-	-
			e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	-	-
			f. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	-	-
			g. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Peningkatan kapasitas SDM masih hanya untuk penanggungjawab area berupa konsultasi ZI, belum terdapat bukti untuk seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi bukti dokumentasi sharing knowledge pada saat rapat mingguan terkait Zona Integritas

KRITERIA PENILAIAN				DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
			h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	-	-
V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)				
	1	Pengendalian Gratifikasi (3)			
			a. Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	Public campaign masih hanya berupa poster saja.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi Public Campaign
			b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Belum terdapat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Kotak pengaduan merupakan salah satu bentuk pengendalian gratifikasi yang ditetapkan organisasi.	BPS Kabupaten Majene belum memiliki inovasi terkait pengendalian gratifikasi
	2	Penerapan SPIP (3)			
			a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	Belum terdapat bukti inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	BPS Kabupaten Majene belum memiliki inovasi terkait lingkungan pengendalian
			b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Bukti telah dilakukan penilaian resiko telah relevan, namun From identifikasi Risiko di BPS Kabupaten Majene belum di tandatangani oleh pejabat penanggung risiko. Belum terdapat bukti inovasi terkait lingkungan pengendalian.	BPS Kabupaten Majene belum memiliki inovasi terkait lingkungan pengendalian
			c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Belum terdapat bukti inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	BPS Kabupaten Majene belum memiliki inovasi terkait kegiatan pengendalian
			d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Bukti SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait masih pada materi paparan di Provinsi Sulbar sehingga baru sebagian pihak yang diinformasikan, sehingga BPS Kabupaten Majene agar melengkapi bukti : Dokumen sosialisasi SPI, misalnya: - melalui apel pagi/sore (bukti foto dan teks arahan pimpinan terkait SPI). - melalui rapat internal (bukti undangan, daftar hadir, notulen yang memuat internalisasi SPI).	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi bukti dukung sosialisasi SPI internal
	3	Pengaduan Masyarakat (3)			
			a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Belum terdapat bukti inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	BPS Kabupaten Majene belum memiliki inovasi terkait kegiatan pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
			b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	-	-
			c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	-	-
			d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	-	-
	4	Whistle-Blowing System (3)			
			a. <i>Whistle Blowing System</i> sudah di internalisasi	Bukti sosialisasi di BPS Provinsi sudah di lampiran, BPS Kabupaten Majene agar menambahkan bukti dukung : Dokumen dan capture internalisasi Whistle Blowing System (WBS), antara lain: - rapat (undangan, daftar hadir, notulen, foto - bimtek (laporan, foto) - apel pagi/sore (foto, teks arahan pimpinan) - dll	BPS Kab Majene telah melengkapi bukti dukung sosialisasi WBS
			b. <i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Bukti pendukung WB telah diterapkan belum mendukung sepenuhnya sehingga perlu dilengkapi bukti dukung : SK Tim/unit yang menangani WBS	BPS Kab Majene telah melengkapi bukti dukung SK terkait WBS
			c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	-	-
			d. Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	-	-
	5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)			
			a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	-	-
			b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Bukti Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi yang disampaikan tidak relevan, kirimkan kembali bukti sosialisasi terkait Benturan Kepentingan di BPS Kabupaten Majene tahun 2019 berupa : - rapat (undangan, daftar hadir, notulen, foto - bimtek (laporan, foto) - apel pagi/sore (foto, teks arahan pimpinan) - dll	BPS Kab Majene telah melengkapi bukti dukung berupa sosialisasi/internalisasi

KRITERIA PENILAIAN				DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
			c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Belum terdapat bukti telah diimplementasikan ke seluruh unit kerja, semisal surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.	BPS Kabupaten Majene telah menambahkan bukti dukung implementasi benturan kepentingan berupa nota dinas tim penguatan pengawasan, SOP Benturan kepentingan, dan sumpah PNS namun belum menyampaikan identifikasi benturan kepentingan dan pernyataan bebas benturan kepentingan
			d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	-	-
			e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	-	-
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)				
	1	Standar Pelayanan (3)			
			a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	Belum terdapat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	BPS Kabupaten Majene belum memiliki inovasi terkait standar pelayanan
			b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	Belum terdapat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	BPS Kabupaten Majene belum memiliki inovasi terkait maklumat standar pelayanan
			c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	BPS Kabupaten Majene agar melampirkan bukti dukung SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi bukti dukung berupa SOP Pelayanan
			d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	BPS Kabupaten Majene agar melampirkan bukti pendukung telah melakukan reviu atas standar pelayanan.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi bukti pendukung telah melakukan reviu atas standar pelayanan/SOP (ditanyakan ke dedi nilai A or B)
	2	Budaya Pelayanan Prima (3)			
			a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Tambahkan bukti dukung berupa dokumen sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai, antara lain: - rapat (undangan, daftar hadir, notulen) - sosialisasi/pelatihan/bimtek (laporan dan materi) - dll	BPS kabupaten Majene telah melengkapi sosialisasi Penerapan Pelayanan Prima
			b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	-	-
			c. Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Belum terdapat bukti dukung punishment dan reward bagi pelaksana layanan dan kompensasi kepada penerima layanan bila tidak sesuai standar.	BPS kabupaten Majene telah melengkapi bukti dukung pemberian penghargaan petugas layanan terbaik di bulan Juli 2019
			d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	-	-
			e. Terdapat inovasi pelayanan	Belum terdapat inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain.	BPS Kabupaten Majene belum memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja yang lain
	3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)			
			a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Belum dilengkapi dengan bukti dukung.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi bukti dukung berupa survey kebutuhan data
			b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Belum dilengkapi dengan bukti dukung.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi bukti dukung akses hasil survey kebutuhan data
			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Belum dilengkapi dengan bukti dukung.	BPS Kabupaten Majene telah melengkapi bukti dukung berupa rapat terkait tindak lanjut perbaikan hasil survey